

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang diantara negara-negara asia lain pada umumnya, jika dibanding dengan negara- negara di Eropa yang telah lebih dulu mengalami kemajuan (modern), maka negara -negara Asia adalah negara yang bagian lain yang identik dengan kemiskinan. berbagai krisis yang melanda negara Asia Tenggara sejak tahun 1990-an hingga tahun 2000-an kawasan Asia Tenggara (Malaysia, Indonesia, singapura, Vietnam, Thailand) mengalami krisis yang multidimensional.

Sebagai negara besar Indonesia tidak terlepas dari berbagai krisis yang melanda di hampir seluruh Asia, khususnya Asia tenggara. Menjadi sulit bagi Indonesia untuk bergerak keperadapan yang lebih maju, dalam arti mampu mensejahterakan negara – negara dan rakyatnya kalau tidak dikatakan terpelosok tidak sanggup bersaing dan bersanding dengan negara – negara setingkat Asia(Jepang, Iran, India) , atau salah satu dari meraka. Krisis multidimensi menjadikan Indonesia berpotensi menetasakan bencana patologi sosial), dinamika dan problem sosial (gesekan antar etnis), kemiskinan, kebodohan, kejahatan, kelaparan dan tidak sehatnya dinamika kepemimpinan Indonesia.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial karena pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak hak dasar masyarakat. Di samping itu pemerintah juga memiliki

peran sebagai pembuat kebijakan serta penyedia dan pengelola anggaran. Namun demikian dalam implementasi pembangunan kesejahteraan sosial tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat.

Undang – undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat adanya sumber daya manusia sejahtera sosial. SDM kesejahteraan sosial terdiri atas .1) tenaga kesejahteraan sosial, 2) pekerja sosial, 3) penyuluh sosial dan 4) relawan sosial. turut memperkuat Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tersebut, dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin masyarakat SDM kesejahteraan sosial ditambah adanya tenaga pendamping dalam penyelenggarannya.

Membangun masyarakat Indonesia agar mampu mengapai kesejahteraan dan pemberdayaan adalah dengan melibatkan semua unsur yang ada dalam sebuah negara, masyarakat dan pemerintah. Pemerintah ikut serta mempengaruhi perubahan sosial masyarakat dengan landasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan disisi lain masyarakat sebagai individu atau kelompok yang secara langsung mempengaruhi perubahan itu sendiri memerlukan keterbukaan budaya maupun peningkatan etos kerja yang selaras dan terarah.

Kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia hingga masa kini adalah suatu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dari masa ke masa dan perlu untuk segera dituntaskan. Ketimpangan pangan dapat memberikan dampak buruk pada masyarakat hal ini dikarenakan kesediaan pangan yang tidak untuk dikonsumsi karena dapat menurunkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Persoalan pangan

adalah masalah yang kompleks dan sangat memerlukan perhatian dari pemerintah sehingga dibutuhkan penanganan khusus program terpadu dan berkelanjutan.

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk Nontunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau E warong yang bekerja sama dengan Bank penyalur.

Kemiskinan dikabupaten jombang dari tahun 2016 sampai 2020 sudah mengalami penurunan, akan tetapi angka kemiskinan masih relatif tinggi. Seperti yang ada di Kecamatan Bandarkedungmulyo penduduk penerima bantuan KPM BPNT mencapai 4.327 orang. Berikut rincian jumlah per desa penerima bantuan KPM BPNT pada bulan Januari 2021.

Tabel.1.1 Jumlah penerima bantuan KPM BPNT DI Kecamatan Bandarkedungmulyo

No	Desa	Jumlah
1.	Bandarkedungmulyo	417
2.	Banjarsari	180
3.	Barongsawahan	239
4.	Brangkal	536
5.	Brodot	590
6.	Gondang manis	489
7.	Karangdagangan	219
8.	Kayen	416
9.	Mojokambang	268
10.	Pucangsimo	616
11.	Tinggar	357
	Jumlah	4.327

Sumber: Data Kecamatan Bandarkedungmulyo, 2021

Pelaksanaan BPNT di Kecamatan Bandarkedungmulyo mengacu pada masyarakat yang telah terdaftar menjadi peserta KPM, selain akan mendapat bantuan sosial dari program BPNT peserta tersebut akan secara otomatis terdaftar

menjadi peserta program keluarga harapan (PKH), di dalam kartu KKS elektronik terdapat sistem saving, account, dan e wallet atau dompet elektronik sehingga peserta KPM dapat membelanjakan dana sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan ditabung serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.

Masalah yang sering terjadi adalah pada KPM lansia yang kurang mengerti cara pengambilan Bantuan Pangan Nontunai, seperti cara menekan pin dan prosedur pengambilannya. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial menyebutkan bahwa SDM kesejahteraan sosial adalah sumber daya manusia yang melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial(Pasal 69 dan pasal 72) tujuan penyelenggaraan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut seiring dengan amanat sustainable development goals (SDGS), dimana Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi tujuan pembangunan.

Perubahan sistem pencairan dan penyaluran dana menjadi Nontunai ternyata masih terjadi problematika terkait dengan penyaluran dana. Karena setiap sistem memiliki siklus pengembangan sistem yang terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan sistem hingga pengoperasian sistem implementasi dari perubahan sistem ini ternyata masih terdapat masalah yang terjadi dalam program ini yaitu adanya penyimpangan dana karena kurangnya pemahaman masyarakat sebagai

penerima dalam penggunaan bantuan Nontunai . Perubahan ini sedikit mengalami hambatan internal maupun eksternal yang membatasi konfigurasi dalam sistem informasi akuntansi yang memicu tindakan dalam problematik terkait penyaluran dana.

Para Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai adalah keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Nontunai. KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Besaran Bantuan Pangan Nontunai adalah Rp. 110.000,- per-KPM setiap bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan atau telur), apabila bantuan tidak dibelanjakan dibulan tersebut, maka nilai bantuan akan hangus dalam akun elektronik Bantuan Pangan. E-Warong ini dikelola Ketua dan anggota yang berjumlah sepuluh orang sesuai dengan kriteria dan persyaratan pada pasal 4 ayat 1 Permensos RI Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kriteria Pembentukan E-Warong, sedangkan RPK (Rumah Pangan Kita) merupakan mitra Perum Bulog serta jaringan outlet penjualan pangan pokok yang dimiliki oleh masyarakat dan dibina oleh Perum Bulog.

Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan indicator kinerja, yang merupakan ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indicator masukan (inputs), keluaran (outputs), dan dampak (impact)". Menurut Halim dalam Herawaty, akuntabilitas publik merupakan

pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, dan hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban. Berdasarkan fenomena yang ada penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang berjudul **Bantuan Pangan Nontunai Berbasis Elektronik Melalui Kartu Kombo (Studi Kasus pada Kecamatan Bandarkedungmulyo).**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana sistem akuntansi penyaluran dan penerimaan kas Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Bandarkedungmulyo?
2. Bagaimana akuntabilitas sistem penyaluran Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Bandarkedungmulyo sesuai dengan indikator-indikator yang digunakan BAPPENAS?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem akuntansi penyaluran dan penerimaan kas Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Bandarkedungmulyo

2. Untuk mengetahui akuntabilitas sistem penyaluran Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Bandarkedungmulyo sesuai dengan indikator – indikator yang digunakan BAPPENAS

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoris;

Bagi seluruh kalangan akademik penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya terutama bagi mahasiswa jurusan akuntansi di STIE PGRI Dewantara Jombang.

B. Manfaat praktis;

1. Dapat digunakan sebagai parameter penilaian apakah sistem akuntansi penyaluran dan penerimaan kas Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Bandarkedungmulyo.
2. Dapat digunakan sebagai parameter penilaian akuntabilitas sistem penyaluran Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Bandarkedungmulyo sesuai dengan indikator – indikator yang digunakan BAPPENAS